



KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

KEPUTUSAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

Nomor : 113/01/Kep KI.Bali/2020

- Menimbang :
1. Bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian dari proses demokrasi di Negara Kesatuan republik Indonesia
 2. Bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia
 3. Bahwa undang undang keterbukaan informasi publik telah ditetapkan pada tahun 2008 dan dinyatakan berlaku sejak tahun 2010
- Mengingat :
1. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28F
 2. Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 3. Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Metoda dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
- Memperhatikan :
1. Penilaian terhadap dokumen dan visitasi terhadap semua badan publik yang menjadi objek Monitoring dan Evaluasi Tahun 2020

2. Berita Acara Keputusan Rapat Pleno Komisi Informasi Provinsi Bali pada hari Senin, 15 Desember 2020

Memutuskan

- Menetapkan : Hasil penilaian dan pemeringkatan dari pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap Badan Publik Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa se-Bali tahun 2020 untuk **Kualifikasi Informatif** seperti terlampir
- Pertama : Penilaian meliputi assesmen terhadap dokumen, verifikasi, klarifikasi, visitasi, dan simulasi terhadap semua objek Monitoring dan Evaluasi Badan Publik, Kecamatan, Kelurahan dan Desa tahun 2020
- Kedua : Hasil Penilaian dalam Monitoring dan Evaluasi tahun 2020 merupakan Informasi Publik yang bersifat terbuka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta turunannya.
- Ketiga : Nilai hasil Monitoring dan Evaluasi Tahun 2020 merupakan informasi publik yang bersifat terbuka dengan klasifikasi Informasi Publik berdasarkan permintaan
- Keempat : Keputusan ini bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diganggu-gugat dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan diperbaiki sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku

Denpasar, 17 Desember 2020

KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

Komisioner,



I G A G A Widiana Kepakisan, S.Sn., M.Ars.

Wakil Ketua

Drs Ketut Suharya Wiyasa

Bidang Kelembagaan

I Made Wijaya, SH.

Bid. Penyelesaian Sengketa Informasi

I Gusti Ngurah Wirajasa, SE.

Bid. Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi,

I Gede Agus Astapa, S.Sos., S.I.Kom, MM.

Tembusan Yth :

1. Gubernur Bali
2. Ketua DPRD Provinsi Bali *c/q* Komisi I
3. Sekretaris Daerah Provinsi Bali
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali
5. Arsip

KEPUTUSAN
KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI
Nomor : 113/01/KEP.KI.Bali/2020

- I. Badan Publik Perangkat Daerah, Kecamatan, kelurahan dan Desa
1. Kabupaten Badung
 1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
 2. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 3. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 7. Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung
 8. Badan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan
 9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 10. Bagian Hukum Setda Badung
 11. Bagian Tata Pemerintahan Setda Badung
 12. Bagian Organisasi Setda badung
 13. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
 14. Kecamatan Abiansemal
 15. Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal
 16. Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan
 17. Desa Mengwitani, Kecamatan mengwi
 18. Kelurahan Benoa
 19. Kelurahan Seminyak
 20. Kelurahan Jimbaran
 2. Kabupaten Bangli
 1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
 2. Dinas Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Tenaga Kerja
 3. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
 3. Kabupate Buleleng
 1. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 3. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
 4. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 6. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
 7. Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng
 8. Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah
 9. Kecamatan Seririt
 10. Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan
 11. Desa Pejarakan, Kecamatan Grokgak
 12. Desa Munduk, Kecamatan Banjar
 13. Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng



4. Kota Denpasar

1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
4. Dinas Kesehatan
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6. Dinas Kebudayaan
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
10. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
11. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
12. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar
13. Badan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan
14. Kecamatan Denpasar Selatan
15. Kecamatan Denpasar Barat
16. Kecamatan Denpasar Timur
17. Desa Ubung Kaja
18. Desa Sanur Kauh
19. Desa Sanur Kaja
20. Desa Dangin Puri Kangin
21. Desa Sumerta Kelod
22. Kelurahan Dangin Puri
23. Kelurahan Pemecutan
24. Perumda Bhukti Praja Sewakadarma
24. Perumda Tirta Sewaka Dharma

5. Kabupaten Gianyar

1. Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Dinas Kebudayaan
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4. Badan Pendapatan Daerah
5. Kecamatan Gianyar
6. Kecamatan Ubud
7. Desa Lebih, Kecamatan Gianyar
8. Desa Peliatan, Kecamatan Ubud
9. Desa Serongga, Kecamatan Gianyar
10. Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud
11. Perumda Tirta Sanjwani Gianyar

6. Kabupaten Jembrana

1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia
5. Kecamatan Negara
6. Kecamatan Melaya
7. Desa Pengambengan



8. Desa Belimbingsari
 9. Desa Tukad daya
 10. Desa Baluk
 11. Kelurahan Lelateng
 12. Kelurahan Tegalcangkring
7. Kabupaten Karangasem
 1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
 2. Dinas Kebudayaan
 3. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
 5. Dinas Kesehatan
 6. Badan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan
 7. Kecamatan Rendang
 8. Kecamatan Selat
 9. Perumda Giri Tohlangkir
 8. Kabupaten Klungkung
 1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 4. Desa Akah
 5. Desa Pakseballi
 6. Desa Gelgel
 9. Kabupaten Tabanan
 1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
 3. Dinas Pertanian
 4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Bakeuda)
 5. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kab. Tabanan
 6. Kecamatan Kediri
 7. Kecamatan Baturiti
 8. Desa Beraban Kec. Kediri
 9. Desa Beraban Kec. Selemadeg Timur
 10. Perumda Tirta Amertha Buana

II. Badan Publik/Instansi Pusat **Informatif**

1. Pengadilan Negeri Denpasar
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
3. Perwakilan BPKP RI Provinsi Bali
4. BPK RI Perwakilan Provinsi Bali
5. BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Bali
6. Ombudsman RI Perwakilan Bali
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali
8. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali
9. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Bali
10. Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Provinsi Bali



III. Pemerintah Daerah

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. Pemerintah Kota Denpasar | Informatif I |
| 2. Pemerintah Kabupaten Badung | Informatif II |
| 3. Pemerintah Kabupaten Buleleng | Informatif III |
| 4. Pemerinah Kabupaten Gianyar | <i>Menuju</i> Informatif |
| 5. Pemerintah Kabupaten Jembrana | <i>Menuju</i> Informatif |
| 6. Pemerinttah Kabupaten Karangasem | <i>Menuju</i> Informatif |
| 7. Pemerintah Kabupaten Tabanan | <i>Menuju</i> Informatif |
| 8. Pemerinttah Kabupaten Klungkung | Cukup Informatif |
| 9. Pemerintah Kabupaten Bangli | Cukup Informatif |



